

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KOTA BANDUNG**

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan tentang ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/Tidak Ada PERDA	Keberadaan PERDA IMB: Ada	Ada	
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya	Jumlah rumah ber IMB s.d. tahun 2018, sebanyak 233.607 unit	41.81 %	
						Jumlah seluruh rumah sd. akhir tahun 2018, sebanyak 558.746 unit		
		3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/Tidak Ada PERDA RTRW	Keberadaan PERDA RTRW: Ada	Ada		
		Peraturan tentang Kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP, sebanyak 1.779.973 orang Jumlah penduduk yang wajib KTP: 1.802.869	98.73 %	
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Biaya Pengurusan KTP dalam PERDA: 0	Rp 0	
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2018 dibagi jumlah penduduk akhir tahun 2018 x 10.000 penduduk	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2018, sebanyak = 341 orang	1.39 per 10.000 penduduk	
						Penduduk pada akhir tahun 2018, sebanyak = 2.452.179 orang		
Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS	ada/tidak ada PERDA	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS: Ada	Ada			
Peraturan tentang Kebersihan Kota	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Pemkot	ada/tidak ada PERDA Kebersihan Pemkot	Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota: Ada	Ada			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Tanggal Penyampaian LPPD 2018: Tepat	Tepat	
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2018 berdasarkan bukti tanda terima: Tepat	Tepat	
			11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 2018 berdasarkan bukti tanda terima: Tepat	Tepat	
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	12	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah urusan wajib yang telah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND	Urusan yang telah diterapkan, sebanyak 6 urusan 1. Urusan Pendidikan: 1 2. Urusan Kesehatan: 1 3. Urusan PU dan Penataan Ruang: 1 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: 1 5. Urusan Trantibum dan Linmas: 1 6. Urusan Sosial: 1	6 Jumlah urusan wajib	
		Hubungan antar daerah	13	Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2018	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2018, sebanyak 63 MOU	63 Jumlah Mou	
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 9 program prioritas	90 %	
						Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 9 program prioritas: 10		
		Kewenangan	15	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007)x 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada tahun 2018, sebanyak 6 urusan : 6	100 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Keuangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2018	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2018	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2018: Tepat	Tepat	
			17	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005: Ada	Ada	
			18	belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%	Total anggaran belanja pelayanan dasar APBD tahun 2018, sebanyak Rp 4.238.355.788.385	57.13 %	
						Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2018, sebanyak Rp 7.418.332.449.314		
		19	belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja x 100 %	Total anggaran belanja untuk kesehatan dan pendidikan sebanyak Rp 2.966.394.023.178	39.99 %		
					Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2018, sebanyak Rp 7.418.332.449.314			
		Pelayanan publik	20	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan: Ada	Ada	
		Kepegawaian	21	Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Pemkot dibagi Jumlah Penduduk	Total PNS {\$bentuk} sebanyak 15.564	0.63 %	
						Penduduk pada akhir tahun 2018, sebanyak = 2.452.179 orang		
			22	Keberadaan sistem informasi kepegawaian	ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Keberadaan sistem informasi kepegawaian: Ada	Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kelembagaan	23	Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 18/2016	Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah pembentukan SKPD , sebanyak 74 unit 1. Bagian (Setda): 11 2. Dinas: 22 3. Badan: 5 4. Kantor: 5. Rumah Sakit: 3 6. Lembaga Teknis Lainnya: 3 7. Kecamatan / Distrik: 30	74 Unit	
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	Jumlah perda tahun 2018	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2018 (Inisiatif DPRD)	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2018 (Inisiatif DPRD), sebanyak 14 Perda	14 Perda	
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	25	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2018	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2018	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018, sebanyak 15 Raperda RAPERDA yang diusulkan tahun 2018, sebanyak 16 Raperda	93.75 %	
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2018 x 100%	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2018, sebanyak 32 keputusan	100 %	
					Keputusan DPRD dalam tahun 2018, sebanyak 32 keputusan.			
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjuti keputusan Walikota	27	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Walikota dalam tahun 2018 x 100%	Keputusan walikota tahun 2018 yang ditindaklanjuti, sebanyak 0 Kep Keputusan walikota tahun 2018, sebanyak 287 Kep	0 %	
		Tindaklanjuti Peraturan Walikota	28	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah peraturan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah peraturan Walikota dalam tahun 2018 x 100%	Peraturan walikota tahun 2018 yang ditindaklanjuti, sebanyak 0 PerWal Peraturan walikota tahun {Stahun}, sebanyak 82 PerWal		0 %
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah Perda yang dibatalkan dibagi jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	PERDA yang dibatalkan : 0 PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah: 3	0 %	
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/Perwal tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA / Perwal	Keberadaan PERDA/Perwal tentang konsultasi publik: Ada	Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Pemkot, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan Perwal	Media informasi yang ditetapkan dengan PerWal: 7	Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2018, sebanyak Rp 2.427.237.815.833	95.29 %	
						Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2018, sebanyak Rp 2.547.276.953.000		
		Alokasi belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	Belanja Langsung (Realisasi), sebanyak Rp 3.063.015.117.070	186.42 %	
						DAU Tahun 2018, sebanyak Rp 1.643.076.905.000		
		Alokasi belanja pada APBD	34	Belanja Publik terhadap total APBD	Total Belanja Langsung dibagi APBD x 100%	Belanja Langsung (Realisasi), sebanyak Rp 3.063.015.117.070	41.29 %	
						Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2018, sebanyak Rp 7.418.332.449.314		
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN /	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) x 100%	PAD APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebanyak 2.571.591.786.199 PAD	43.29 %	
						Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebanyak Rp 5.939.997.423.418		
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan(Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah untuk 2 tahun terakhir	Jenis Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah untuk tahun 2017: WDP	Opini tahun 2017 = WDP Opini tahun 2018 = WDP	
						Jenis Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah untuk tahun 2018: WDP		
		Besaran SILPA	37	SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	SILPA Tahun 2018, sebanyak Rp 233.989.434.987	3.94 %	
						Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebanyak Rp 5.939.997.423.418		
		Realisasi belanja	38	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	Realisasi Belanja Tahun 2018, sebanyak Rp 6.114.248.523.145	82.42 %	
						Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2018, sebanyak Rp 7.418.332.449.314		
		Pengawasan Inspektorat Kota	39	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017	Temuan/rekomendasi BPK RI yang di tindaklanjuti sebanyak 1.105 rekomendasi	81.55 %	
						Temuan/rekomendasi BPK RI sebanyak 1.355 rekomendasi		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi dengan potensi PAD X 100%	Realisasi PAD Tahun 2018, sebanyak 2.571.591.786.199 PAD	84.79 %	
						Potensi PAD Pada tahun 2018: 3.032.839.300.000		
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	$(PAD\ 2018 - PAD\ 2017) : PAD\ 2017 \times 100\%$	Total PAD pada tahun 2018: 2.571.591.786.199	-0.27 %	
						Total PAD pada tahun 2017: 2.578.457.420.885		
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018, sebanyak 107 penghargaan	107 Penghargaan	
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E- procurement	ada/tidak ada implementasi E- Procurement	PERDA tentang implementasi E- procurement: Ada	Ada	
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Ijin Investasi dalam tahun 2018	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2018, sebanyak 2.057 ijin	2,057 Ijin	